

ABSTRAK

Metode penemuan hukum merupakan bentuk penalaran hukum atau interpretasi hakim terkait dengan suatu putusan hukum yang belum jelas atau belum ada dasar hukumnya. Hakim selain memberikan dasar pertimbangan yang baik dalam putusan yang dijatuhkannya, juga harus mampu untuk menentukan dasar hukum yang tepat dalam suatu putusan. Perjanjian kerja dapat berakhir karena hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja atau buruh tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Hal ini telah disepakati dan ditandatangani tidak dapat ditarik kembali atau dirubah kecuali atas persetujuan para pihak. Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Interpretasi Pasal 8 Ayat (1) terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah mempertegas bahwa PKWT dapat dibuat tidak lebih 5 (lima) tahun dengan ketentuan bahwa waktu tersebut sudah termasuk masa perpanjangan. Selain itu pemerintah juga menghapus ketentuan 3 (tiga) tahun dalam PKWT yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Keywords: Perjanjian, Peraturan Pemerintah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu



ABSTRACT

The method of legal discovery is a form of legal reasoning or judge's interpretation related to a legal decision that is unclear or has no legal basis. The judge in addition to providing a good basis for consideration in the decision he imposes, must also be able to determine the appropriate legal basis in a decision. The employment agreement can be terminated because the rights and obligations between employers and workers or laborers must not conflict with company regulations, Collective Labor Agreement and other applicable laws and regulations. It has been agreed and signed irrevocably or amended except by agreement of the parties. From the discussion of the previous chapters in this thesis, the following conclusions can be drawn: Interpretation of Article 8 Paragraph (1) related to Certain Time Work Agreements Based on Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, have affirmed that PKWT can be made not more than 5 (five) years provided that the time includes an extension period. In addition, the government also abolished the 3 (three) year provision in PKWT which was previously regulated in Manpower Law Number 13 of 2003.

Keywords: Agreements, Government Regulations, Specific Time Work Agreements

